



Etika dan Integritas Pilar Utama Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kampus

Jesica Angel

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: jesticangelx@gmail.com

Abstract. *Ethics and integrity play a crucial role in creating an academic environment free from corrupt practices. As a center of learning, the campus should serve as a model for its students in upholding high moral and ethical standards. This article aims to highlight the importance of ethics and integrity as fundamental pillars in efforts to prevent corruption within the academic setting, such as on campus. Through a qualitative approach, data were collected from interviews with two campus workers—a canteen staff member and a parking attendant—who frequently interact indirectly with students and staff. These interviews explore their perspectives on the importance of being honest, responsible, and disciplined in their daily work. The findings show that even though they are not involved in academic activities, both workers contribute significantly to fostering an anti-corruption culture on campus. The canteen staff emphasized the importance of transparency in setting food prices to maintain students' trust, while the parking attendant stressed the need for discipline and order in managing the parking system to prevent irregularities. This article also examines how simple ethical behaviors, such as honesty in transactions and adherence to rules, can have a substantial impact on creating an integrity-driven campus environment. Therefore, the implementation of ethics and integrity is not solely the responsibility of academics but also of every element of the campus community without exception. In conclusion, strengthening the culture of ethics and integrity across all aspects of campus life is an essential part of a sustainable strategy to prevent corruption.*

Keyword : *Ethics, Integrity, Corruption Prevention, Academic Environment, Anti-Corruption Culture*

Abstrak. Etika dan Integritas memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang bersih dari praktik korupsi. Sebagai pusat pembelajaran, kampus sudah seharusnya menjadi teladan bagi mahasiswa mahasiswinya dalam penerapan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Artikel ini bertujuan untuk menekankan bahwa pentingnya etika dan integritas sebagai fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan akademik seperti kampus. Melalui pendekatan kualitatif, hasil data diperoleh dari wawancara dengan dua (2) pekerja kampus, yaitu pihak kantin dan petugas parkir, yang secara tidak langsung sering berinteraksi dengan mahasiswa dan staf. Wawancara ini mengeksplorasi pandangan mereka mengenai pentingnya untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, serta disiplin dalam pekerjaan sehari-hari. Hasilnya menunjukkan bahwa meski tidak terlibat dalam kegiatan akademik, kedua pekerja tersebut juga memiliki kontribusi penting dalam membangun budaya anti-korupsi di lingkungan kampus. Pihak kantin menekankan pentingnya transparansi dalam menetapkan harga makanan demi menjaga kepercayaan mahasiswa, sementara itu petugas parkir menekankan pentingnya disiplin dan keteraturan dalam mengelola parkir guna mencegah penyimpangan. Artikel ini juga mengulas bagaimana perilaku etis sederhana, seperti kejujuran dalam transaksi dan kepatuhan pada peraturan, dapat berdampak signifikan dalam menciptakan lingkungan kampus yang berintegritas. Oleh karena itu, penerapan etika dan integritas bukan hanya tanggung jawab akademisi, tetapi juga seluruh elemen kampus tanpa terkecuali. Kesimpulannya, memperkuat budaya etika dan integritas di seluruh aspek kampus merupakan bagian penting dari strategi berkelanjutan dalam pencegahan korupsi.

Kata kunci : Etika, Integritas, Pencegahan korupsi, Lingkungan akademik, Budaya anti- korupsi

PENDAHULUAN

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah "korupsi" (berasal dari bahasa Latin: *corruption* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) dimana hal tersebut mengacu pada fenomena dimana pejabat atau lembaga negara dapat menyalahgunakan kewenangan mereka melalui Tindakan penyuaipan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya (Evi Hartanti, 2008). Secara lebih rinci, korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut ini :

- a) Kejahatan, tindakan busuk, perilaku yang bisa disuap, tidak bermoral, kejahatan, serta ketidakjujuran.
- b) Tindakan tercela seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan tindakan serupa lainnya.
- c) Korup (busuk; cenderung menerima uang suap atau sogokan; menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain);
- d) Korupsi (tindakan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan sogokan, serta perbuatan tercela lainnya)
- e) Koruptor (orang yang melakukan tindakan korupsi)

Secara harfiah, korupsi dapat diartikan sebagai sesuatu yang jahat, busuk, dan dapat merusak. Ketika berbicara mengenai korupsi, kita akan berhadapan dengan realita seperti itu karena korupsi berkaitan dengan aspek moral. Karakter, dan keadaan yang buruk, penyalahgunaan jabatan dalam institusi atau lembaga pemerintahan, penyimpangan kekuasaan karena imbalan, serta faktor ekonomi dan politik. Selain itu, korupsi juga melibatkan praktik nepotisme, dimana penempatan anggota keluarga atau kelompok tertentu dilakukan dalam dinas di bawah kekuasaan jabatannya. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dikatakan bahwa istilah korupsi mencakup makna yang sangat luas

1. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, atau institusi lainnya) untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan untuk pihak lainnya
2. Korupsi juga berarti perilaku busuk; kerusakan moral; menyalahgunakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; serta dapat disuap atau disogok (memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri)

Menurut Subekti dan tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan *curruptie* adalah korupsi; tindakan penipuan atau perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Korupsi di Indonesia telah menjadi bagian masalah yang meresahkan berbagai lapisan masyarakat, terutama dikalangan mahasiswa. Keterlibatan mereka dalam upaya memberantas korupsi tentu bukan pada aspek penindakan, karena hal tersebut merupakan tugas dan

wewenang aparat penegak hukum. Peran aktif mahasiswa lebih diharapkan pada aspek pencegahan, dimana dengan turut serta dalam membangun budaya anti-korupsi ditengah-tengah masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai agen perubahan sekaligus penggerak utama dalam menggerakkan gerakan anti-korupsi dilingkungan sekitarnya seperti lingkungan sosial (Nur Aziza, & Dedi, 2022). Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kaum intelektual yang diharapkan mampu membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Sebagai agen perubahan, mahasiswa tidak hanya berperan dalam proses akademik, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya etika dan integritas sebagai benteng pencegahan korupsi. Melalui kegiatan diskusi, seminar, kampanye, dan edukasi publik, mahasiswa dapat menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan ini.

Di lingkungan kampus, mahasiswa juga diharapkan menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip kejujuran dan keterbukaan, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam kegiatan organisasi. Hal ini sejalan dengan fungsi kampus sebagai institusi yang membentuk karakter dan moral generasi muda. Kampus tidak hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat pembentukan sikap dan perilaku yang mendukung budaya integritas.

Lebih dari itu, mahasiswa juga bisa terlibat dalam pengawasan kebijakan publik dengan berpartisipasi dalam forum-forum diskusi yang membahas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Mereka bisa mendorong munculnya kebijakan yang lebih transparan dan memastikan bahwa anggaran yang disalurkan untuk program-program kemahasiswaan dan kampus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab. Peran mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi ini bukan hanya sekedar aktivitas tambahan, melainkan suatu kewajiban moral untuk menjaga masa depan bangsa dari korupsi yang semakin mengakar.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton dalam upaya pemberantasan korupsi, melainkan pemain aktif yang turut membangun dan memperkuat budaya anti-korupsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis tematik karena metode ini paling sesuai untuk menggali pemahaman mendalam dari wawancara terkait peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Analisis tematik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan, yang sangat relevan dalam membangun budaya anti-korupsi di lingkungan akademik terkhusus lingkungan kampus. Metode ini dipilih karena efektif untuk menggambarkan pandangan narasumber

mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Data diperoleh melalui wawancara dan kemudian dijelaskan secara deskriptif, tanpa menggunakan analisis yang terlalu rumit. Setiap informasi penting dari wawancara disajikan langsung sesuai dengan jawaban narasumber, yang kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan dua narasumber dari lingkungan kampus, yaitu ibu kantin dan tukang parkir, yang secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pandangan mereka mengenai pentingnya etika, integritas, dan peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Berikut adalah hasil dari wawancara tersebut:

Tabel 1. Hasil wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban Pihak Kantin	Jawaban Tukang Parkir
1.	Seberapa penting arti kejujuran di kampus ini?	Kejujuran itu penting, kalo kita tidak jujur, bisa merugikan orang lain.	Kalo menurut saya, kejujuran itu penting dimana mahasiswa harus belajar jujur dalam hal kecil seperti parker tertib.
2.	Bagaimana pandangan Ibu/Bapak tentang mahasiswa dan integritas?	Sebagian mahasiswa sudah baik dalam hal ini tetapi masih ada yang kurang peduli	Kalo menurut bapak, integritas harus dimulai dan dilakukan, contohnya seperti parker rapi dan mengikuti aturan yang ada disini.
3.	Apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mencegah korupsi?	Mulai dari diri sendiri seperti jangan menyontek, jujur ketika membeli sesuatu, karena jika hal sepele seperti ini sulit untuk mereka terapkan makan akan jadi kebiasaan yang buruk.	Harus ada nya rasa peduli tidak hanya ikut ikutan kampanye tapi tidak ada aksi melainkan berani bertindak jika ada yang tidak benar.
4.	Pernahkah melihat Mahasiswa melakukan tindakan tidak jujur?	Tentu saja, kadang ada yang suka nitip absen ke teman, atau curang pada waktu ujian, itu sudah sering terdengar, tapi tidak semua seperti itu.	Sejauh ini sih ada saja ya, ada yang parkir sembarang sehingga merusak kendaraan orang lain. Sudah saya coba ingatkan, tapi masih ada aja yang bandel
5.	Apa harapan Ibu/Bapak terhadap mahasiswa dalam menjaga integritas?	Semoga mereka lebih jujur dan menghargai aturan, baik dikampus maupun diluar. Jika sudah terbiasa melakukan hal yang jujur dan baik, nanti nya bisa jadi pemimpin yang baik	Saya berharap mahasiswa bisa jadi contoh yang baik. Jangan cuma bicara tentang korupsi, tapi tunjukan juga sikap yang baik dikampus.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik ibu kantin maupun tukang parkir menilai bahwa kejujuran dan integritas merupakan nilai dasar yang harus diinternalisasi oleh mahasiswa. Misalnya, ibu kantin mengungkapkan bahwa tindakan nitip absen dan tidak antri merupakan bentuk kurangnya kejujuran, yang bisa merugikan orang lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan tukang parkir yang menekankan pentingnya kejujuran dalam hal kecil, seperti tertib parkir.

Dari pandangan kedua narasumber, terlihat bahwa meskipun sebagian mahasiswa memahami konsep integritas, penerapannya masih perlu ditingkatkan. Dalam menjawab pertanyaan mengenai langkah pencegahan korupsi, keduanya sepakat bahwa mahasiswa harus mulai dari hal-hal kecil, seperti tidak menyontek atau tidak nitip absen. Ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan korupsi bisa dimulai dari disiplin dalam hal-hal sederhana.

Lebih lanjut, kedua narasumber juga mencerminkan bahwa praktik ketidakjujuran masih terjadi di kalangan mahasiswa. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi mereka untuk membangun integritas di lingkungan akademik. Namun, harapan mereka tetap optimis, di mana ibu kantin berharap mahasiswa bisa menjadi pemimpin yang baik, dan tukang parkir berharap mahasiswa dapat menjadi contoh sikap yang baik di kampus.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggarisbawahi pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti-korupsi di kampus. Menerapkan etika dan integritas dalam tindakan sehari-hari sangatlah penting untuk mencegah korupsi di masa depan.

Ciri-Ciri Praktik Korupsi Di Lingkungan Kampus

Dalam era globalisasi yang semakin maju, masalah korupsi di lingkungan pendidikan, khususnya di kampus, menjadi isu yang semakin mendesak untuk diatasi. Praktik-praktik korupsi yang terjadi di dunia akademik tidak hanya merugikan institusi pendidikan, tetapi juga mengancam integritas dan kualitas pendidikan itu sendiri. Bab ini akan membahas berbagai ciri-ciri praktik korupsi yang umum dijumpai di lingkungan kampus, seperti plagiarisme, manipulasi nilai, dan nepotisme. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, diharapkan pihak-pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus, dapat lebih waspada dan berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi di dunia pendidikan.

1. Plagiarisme

Plagiarisme adalah tindakan yang sangat serius dalam konteks akademik, di mana seseorang mengklaim karya, ide, atau kata-kata orang lain sebagai miliknya sendiri tanpa memberikan atribusi yang layak. Dalam lingkungan akademik Indonesia, plagiarisme sering terjadi, terutama dalam penulisan tugas akhir, skripsi, dan karya ilmiah. Praktik ini merusak integritas akademik, menciptakan ketidakadilan di antara mahasiswa yang jujur, dan menghancurkan kepercayaan terhadap hasil karya ilmiah secara keseluruhan. Plagiarisme juga memiliki dampak jangka panjang, tidak hanya pada reputasi individu tetapi juga pada institusi pendidikan itu sendiri, yang bisa mengurangi akreditasi dan kepercayaan masyarakat. (Sukardi, D, 2017).

2. Manipulasi Nilai

Manipulasi nilai adalah praktik yang mencederai prinsip keadilan dan integritas dalam penilaian akademik. Hal ini sering terjadi ketika mahasiswa atau pihak lain memberikan suap atau melakukan intervensi yang tidak sah untuk mempengaruhi hasil penilaian. Contohnya, mahasiswa mungkin memberikan imbalan kepada dosen untuk meningkatkan nilai mereka, atau pihak administrasi kampus terlibat dalam manipulasi nilai untuk kepentingan tertentu. Tindakan ini tidak hanya merugikan mahasiswa lain yang berusaha dengan jujur, tetapi juga merusak kredibilitas institusi pendidikan dan menurunkan standar akademik. (Haryatmoko, 2019)

3. Titip Absen

Praktik titip absen adalah salah satu bentuk kecurangan yang tampaknya sepele tetapi dapat memiliki dampak besar terhadap etika akademik. Dalam praktik ini, seorang mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan meminta temannya untuk menandatangani daftar hadir, yang menunjukkan ketidakjujuran dalam memenuhi kewajiban akademik mereka. Tindakan ini menciptakan budaya di mana kehadiran tidak dianggap serius dan dapat mengurangi rasa tanggung jawab individu terhadap proses pembelajaran. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan integritas mahasiswa secara keseluruhan.

4. Nepotisme Dalam Penerimaan Mahasiswa atau Tenaga Pengajar

Nepotisme merupakan praktik ketidakadilan yang sering terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru atau pengangkatan dosen. Ketika keputusan penerimaan atau pengangkatan dibuat berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kenalan, bukan pada kualitas dan kompetensi, hal ini dapat merugikan banyak pihak. Nepotisme menciptakan lingkungan di mana orang-orang yang tidak memenuhi syarat dapat menduduki posisi yang seharusnya diberikan kepada individu yang lebih berkualitas. Praktik ini tidak hanya merusak sistem pendidikan tetapi juga mempengaruhi moral dan motivasi mahasiswa dan dosen yang bekerja keras.

5. Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Transparan

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan akademik sering kali terjadi melalui manipulasi tender dan hubungan tidak transparan. Ketika proyek-proyek diberikan kepada pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan pengelola kampus, bukan berdasarkan kompetensi, hal ini menciptakan celah bagi korupsi. Praktik ini sering disertai dengan mark-up harga atau penggelembungan anggaran, yang merugikan institusi pendidikan dan masyarakat secara umum. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

6. Penyalahgunaan Dana Penelitian

Penyalahgunaan dana penelitian terjadi ketika dana yang dialokasikan untuk penelitian digunakan untuk kepentingan pribadi atau ketika laporan keuangan dipalsukan. Hal ini sering muncul dalam hibah penelitian yang diberikan kepada dosen dan peneliti di perguruan tinggi. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan krisis integritas dalam penelitian akademik, tetapi juga dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, karena dana yang seharusnya digunakan untuk penelitian yang bermanfaat malah disalahgunakan. Ini juga mengurangi kepercayaan pada proses penelitian dan publikasi di dunia akademik.

7. Kecurangan Dalam Ujian

Kecurangan dalam ujian adalah masalah yang kompleks dan umum di dunia pendidikan, termasuk di Indonesia. Praktik ini bisa berupa menyontek, menggunakan bahan referensi secara tidak sah, atau kolusi antara mahasiswa dan pengawas ujian. Budaya menyontek sering kali dianggap sebagai hal yang wajar, namun praktik ini merusak nilai pendidikan dan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kompetensi yang seharusnya. Kecurangan ini juga menciptakan lingkungan yang tidak adil bagi mahasiswa yang berusaha belajar dengan jujur.

8. Kolusi Antar Dosen dan Mahasiswa

Kolusi antara dosen dan mahasiswa adalah bentuk korupsi yang merugikan integritas akademik dan kepercayaan antara dosen dan mahasiswa lainnya. Dalam praktik ini, dosen memberikan kemudahan atau perlakuan khusus kepada mahasiswa tertentu dalam bentuk nilai atau tugas, sering kali atas dasar hubungan pribadi atau imbalan. Kolusi semacam ini tidak hanya merusak pengalaman belajar mahasiswa yang jujur, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem pendidikan, di mana mahasiswa yang tidak memiliki hubungan dekat dengan dosen merasa dirugikan.

Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Setelah mengidentifikasi ciri-ciri praktik korupsi yang umum terjadi di lingkungan kampus, langkah selanjutnya adalah memahami faktor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut muncul. Ciri-ciri tersebut memberi kita gambaran tentang bagaimana korupsi dapat terwujud, tetapi untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, kita perlu menggali lebih dalam ke akar penyebabnya.

Faktor-faktor ini tidak hanya menjelaskan mengapa korupsi terjadi, tetapi juga memberikan wawasan tentang kondisi yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Dengan memahami penyebab di balik ciri-ciri yang telah diidentifikasi, kita dapat mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi di lingkungan akademik. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan kita dapat bersama-sama membangun lingkungan pendidikan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas.

Lemahnya pendidikan agama dan etika, Kurangnya pendidikan agama dan etika menjadi salah satu penyebab utama timbulnya korupsi. Ketika nilai-nilai moral dan spiritual tidak ditanamkan sejak dini, perilaku korupsi lebih mudah muncul di kemudian hari.

- a. Kolonialisme, Pemerintahan asing pada masa kolonial tidak mampu membangkitkan rasa kesetiaan dan kepatuhan dari masyarakat yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Kolonialisme justru menciptakan jarak yang besar antara pemerintah dan rakyatnya, yang memungkinkan korupsi tumbuh subur.
- b. Kurangnya pendidikan, Meski secara umum pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk menekan korupsi, kenyataannya banyak kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, serta menduduki posisi terhormat di masyarakat. Oleh karena itu, alasan kurangnya pendidikan kurang relevan dalam konteks ini.
- c. Kemiskinan, Kemiskinan seringkali dianggap sebagai salah satu pemicu korupsi. Namun, di Indonesia, mayoritas kasus korupsi dilakukan bukan oleh mereka yang kekurangan secara finansial, melainkan oleh orang-orang kaya dan konglomerat yang didorong oleh keserakahan, bukan kebutuhan.
- d. Tidak adanya sanksi yang keras, Kurangnya pemberlakuan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku korupsi membuat tindakan ini sulit diberantas. Ketika hukum tidak dijalankan dengan tegas, korupsi akan terus berlanjut.
- e. Lingkungan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi, Kurangnya lingkungan yang kondusif bagi gerakan anti-korupsi menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan. Lingkungan yang subur untuk praktik korupsi justru menyulitkan para pejuang anti-korupsi.
- f. Struktur pemerintahan, Struktur pemerintahan yang tidak efisien, birokratis, dan kompleks menciptakan celah-celah yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Sistem yang rumit sering kali membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
- g. Perubahan radikal, Korupsi sering kali muncul di tengah perubahan nilai-nilai sosial yang drastis, di mana masyarakat dan pemerintah sedang beradaptasi dengan sistem baru. Dalam situasi transisi ini, korupsi dapat muncul sebagai penyakit sosial yang sulit dikendalikan.

h. Keadaan masyarakat, Korupsi dalam birokrasi sering kali mencerminkan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Jika masyarakat terbiasa dengan perilaku yang tidak jujur, maka korupsi akan menjadi hal yang umum di berbagai sektor, termasuk dalam pemerintahan.

Faktor yang paling memengaruhi dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin di masyarakat. Kombinasi antara moralitas yang lemah dan rendahnya standar intelektual pemimpin dapat memicu terjadinya korupsi. Beberapa langkah yang dapat mengurangi korupsi, meskipun tidak sepenuhnya memberantasnya, antara lain:

- 1) Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintahan dalam tujuan-tujuan nasional serta kepentingan publik yang dilandasi oleh spiritualitas dan moralitas.
- 2) Administrasi yang efisien serta restrukturisasi pemerintahan yang tepat untuk menghindari celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi.
- 3) Adanya kondisi sejarah dan sosial yang mendukung pemberantasan korupsi.
- 4) Berfungsinya sistem yang efektif dalam melawan korupsi.
- 5) Kepemimpinan dari kelompok-kelompok yang memiliki standar moral dan intelektual yang tinggi.

Strategi Pengembangan Kesadaran Anti-Korupsi Lembaga Pendidikan

Pemberantasan korupsi terus berjalan dan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia di era reformasi. Berbagai langkah telah diambil untuk mencegah dan memberantas korupsi secara bersamaan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Upaya-upaya tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup baik dan menghasilkan kemajuan, seperti semakin berkembangnya kesadaran untuk memerangi korupsi hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Pada masa reformasi, sejumlah lembaga pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi dibentuk, di antaranya KPK, PPATK, dan LPSK. Semua ini dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas dalam memerangi korupsi.

Selain itu, untuk memberantas korupsi, mahasiswa dan siswi perlu berperan aktif sebagai agen perubahan di lingkungan kampus. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi pelopor dalam menanamkan nilai-nilai etika dan integritas, agar generasi muda mampu berkontribusi dalam menciptakan budaya anti-korupsi yang kokoh. Dalam mendukung gerakan anti-korupsi, lembaga pendidikan dapat melaksanakan dua hal. Pertama, proses pendidikan perlu menciptakan kepedulian yang tulus, membangun kemampuan berpikir objektif, dan mengembangkan sudut pandang yang universal pada setiap individu. Kedua, pendidikan harus diarahkan pada pengembangan strategis, yaitu meningkatkan kualitas pribadi individu agar terjalin dengan kuat dalam keterlibatan politik mereka.

Salah satu faktor penyebab maraknya korupsi adalah masih rendahnya budaya anti korupsi. Peningkatan budaya anti korupsi perlu dilakukan melalui optimalisasi program Pendidikan dan kampanye anti-korupsi. Pada tahun 2012, program pendidikan dan kampanye anti korupsi tampaknya baru intensif dilakukan oleh KPK. Hal ini sangat wajar karena KPK secara tegas diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi, Namun demikian alangkah baiknya bila upaya tersebut digerakan bersama oleh seluruh institusi negara dan elemen masyarakat.

NKRI memiliki sifat keutuhan yang nyata, yang memungkinkan kita menjaga negara ini agar terhindar dari perpecahan, penindasan, dan berbagai tindakan merusak bangsa serta negara. Persatuan dan kesatuan menjadi senjata paling efektif bagi bangsa Indonesia, baik dalam usaha merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga NKRI, karena dengan Pancasila kita bisa melindungi keberlangsungan UUD 1945. Sebagai fondasi sistem pemerintahan kita, Pancasila bertindak sebagai benteng budaya bangsa yang melindungi dari pengaruh luar. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai bekal bagi mahasiswa untuk berkontribusi di luar negeri, sehingga nama negara kita bisa lebih dikenal di kancah internasional. Dengan demikian, jelas bahwa menjaga NKRI sangat penting, sebagai salah satu bentuk implementasi dari Pancasila, yang mana generasi muda harus turut berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankannya.

Oleh karena itu, menjaga NKRI dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas generasi muda, tetapi juga merupakan langkah awal dalam memerangi korupsi. Korupsi dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan yang telah dibangun, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan semangat menjaga keutuhan NKRI, kita juga harus berkomitmen untuk memberantas korupsi dan membangun bangsa yang lebih baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi sangatlah krusial, terutama sebagai agen perubahan yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi motor utama dalam menyebarkan nilai-nilai anti-korupsi, baik di dalam kampus maupun di masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan integritas dalam kehidupan akademik sehari-hari, mereka turut berkontribusi dalam membangun budaya anti-korupsi yang kuat di Indonesia.

Tantangan signifikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika di era Generasi Milenial tidak bisa dianggap remeh.¹⁹ Di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan sosial yang dinamis,

generasi muda dihadapkan pada berbagai godaan dan tantangan yang dapat mengikis jati diri bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai tersebut agar dapat tetap relevan dan menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada.

Agar peran ini dapat diwujudkan secara efektif, kolaborasi antara mahasiswa, dosen, pengelola kampus, dan berbagai pihak terkait lainnya sangat diperlukan. Pendidikan mengenai anti-korupsi harus dimulai dari lingkungan akademis, dan mahasiswa perlu terus didorong untuk menjadi teladan dalam hal kejujuran, tanggung jawab, serta transparansi. Melalui langkah-langkah strategis yang didukung oleh kesadaran kolektif, praktik korupsi di lingkungan kampus dapat diminimalisir. Harapannya, ini akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

Saran

Dalam upaya membangun budaya anti-korupsi yang kuat di Indonesia, peran mahasiswa sangatlah krusial. Sebagai generasi penerus dan agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami nilai-nilai integritas dan etika, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak yang mempengaruhi lingkungan kampus dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa saran yang untuk memperkuat peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi di lingkungan akademik :

1. **Sosialisasi Nilai Anti-Korupsi di Organisasi Mahasiswa:** Setiap organisasi mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau himpunan jurusan, bisa secara rutin mengadakan diskusi atau kampanye kecil mengenai anti-korupsi. Dengan demikian, nilai-nilai integritas dan transparansi bisa disebarkan di level yang dekat dengan mahasiswa, membuat pesan lebih mudah diterima.
2. **Mendorong Transparansi dalam Kegiatan Kampus:** Mahasiswa bisa mulai dari hal-hal yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka, seperti pengelolaan anggaran kegiatan mahasiswa atau pemilihan ketua organisasi. Misalnya, memastikan laporan keuangan kegiatan kampus terbuka dan dapat diakses oleh semua anggota organisasi. Hal ini akan melatih mahasiswa untuk selalu mengedepankan transparansi dalam kegiatan kecil sebelum mereka masuk ke ranah yang lebih besar.
3. **Kerja Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau LSM Anti-Korupsi:** Mahasiswa bisa berkolaborasi dengan lembaga seperti KPK untuk mengadakan workshop atau seminar bertema anti-korupsi. Program magang atau menjadi relawan di

- LSM anti-korupsi juga bisa menjadi cara realistis bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam aksi anti-korupsi dan membawa pengalaman itu kembali ke kampus.
4. Pelatihan Etika dan Integritas: Mahasiswa bisa berinisiatif meminta atau menyarankan kampus untuk mengadakan pelatihan singkat atau seminar tentang etika dan integritas. Hal ini bisa dilakukan dalam rangkaian orientasi mahasiswa baru atau disisipkan dalam kegiatan akademik tahunan yang sudah berjalan.
 5. Pembuatan Kanal Laporan Transparansi di Kampus: Mahasiswa bisa mendorong pihak kampus untuk menyediakan kanal pelaporan yang anonim bagi setiap mahasiswa yang mengetahui adanya penyimpangan di kampus, seperti praktik pungutan liar atau nepotisme. Hal ini membuat mahasiswa merasa dilibatkan langsung dalam pengawasan internal kampus.
 6. Kampanye di Media Sosial Mahasiswa: Tanpa perlu anggaran besar, mahasiswa bisa menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan anti-korupsi dengan konten-konten kreatif seperti meme, video singkat, atau infografis. Media sosial adalah alat yang efektif untuk menjangkau teman-teman sebaya dengan cara yang sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1990). *Kamus lengkap bahasa Indonesia modern*. Pustaka Amani.
- Dedi, N. A. (2022). Pentingnya pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa. *JUSTICE: Journal of Law*, 1(1), 46-54.
- Gunawan, S. (2015). *Budaya akademik dan integritas mahasiswa di perguruan tinggi*. Alfabeta.
- Hartanti, E. (2008). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Haryatmoko. (2019). *Etika publik untuk integritas pelayanan publik*. Kanisius.
- Hasan, Z. (2024). Implementasi nilai-nilai NKRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 285.
- Hasan, Z. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konsep Bhineka Tunggal Ika sebagai sarana mengikat bangsa pada zaman generasi milenial. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 293.
- Hasan, Z. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 312.
- Hidayat, M. (2018). *Moralitas akademik: Tantangan dan solusi dalam pendidikan tinggi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Lubis, F. (2012). *Korupsi akademik dan etika dosen*. Mizan.
- Poerwadarminta, S. W.-W. (1956). *Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Hasta.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Puspito, W. (2016). *Pengadaan barang dan jasa di lembaga pendidikan: Menghindari korupsi*. Universitas Airlangga Press.
- Setiyadi, A. (2014). *Integritas akademik: Penyalahgunaan dana dan moralitas di perguruan tinggi*. Penerbit Ombak.
- Sukardi, D. (2017). *Plagiarisme dalam dunia pendidikan*. Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan tindak korupsi (Strategi dan optimalisasi)*. Sinar Grafika.
- Zuhdi, S. (2013). *Korupsi akademik: Penyebab dan solusi*. Pustaka Obor.